

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DIDESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP

Oleh

DESWIYA ULFA^{1*}

NIM : E1012141008

S.Y. Pudjianto^{2*}, Agus Eka^{2*}

*Email : e1012141008@student.untan.ac.id

1. Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan implementasi Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Nugroho (2003, 179-182) dalam menampilkan keefektifan implementasi program yang meliputi 4 (empat) unsur tepat yakni : a. Tepat kebijakan, kesimpulannya program keluarga harapan belum tepat kebijakan dilihat dari masih banyak nya masyarakat tidak mampu belum mendapatkan bantuan. b. Tepat pelaksanaannya, kesimpulannya belum tepat pelaksanaannya dalam penyelenggaraan program ini secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan program, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat selaku target dari Program Keluarga Harapan (PKH).c. Tepat target, kesimpulannya tidak tepat target penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya. d. Tepat lingkungan kesimpulannya bahwa lingkungan dari program tidak sepenuhnya tepat namun perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dari para implementor program maupun target atau sasaran dari program yang perlu adanya dukungan. Hasil penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan pada dasarnya pelaksanaannya sudah cukup berhasil dan efektif namun belum sepenuhnya, pada pelaksanaannya dilapangan masih terdapat masyarakat miskin yang memenuhi kriteria tapi belum mendapatkan bantuan. Hal ini di sebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan dari pihak yang terlibat sehingga menyebabkan tidak maksimalnya empat tepat kebijakan yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target dan tepat lingkungan. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan perlu adanya pengkajian kembali tentang isi program dan keberlangsungan kebijakan.

Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi, Program Keluarga Harapan

**THE EFFECTIVENESS OF FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) IN
PAL IX VILLAGE, SUNGAI KAKAP SUBDISTRICT**

Written by:

DESWIYA ULFA^{1*}

Student Number: E1012141008

S.Y. Pudjianto^{2*}, Agus Eka^{2*}

*Email: e1012141008@student.untan.ac.id

1. Student of the Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.
2. Lecturer of the Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

ABSTRACT

This thesis aims to assess and examine the efficacy of the Family Hope Program in Pal IX Village, Sungai Kakap Subdistrict, Kubu Raya Regency. This research employs a descriptive method with a qualitative approach. The researcher used Nugroho's (2003, 179-182) theory to demonstrate the effectiveness of the program's implementation, which consists of four (four) components: a. Appropriate Policy. Based on the number of poor people who have not gotten support, it is concluded that the hopeful family program is not the best policy. b. Appropriate Implementers. It can be determined that the quality and number of implementers were insufficient to carry out the program's objectives of organizing and empowering the community (PKH). b. Appropriate Target. It can be determined that the beneficiaries are not meeting the requirements and are not on target. d. Appropriate Environment. It can be concluded that the program's environment is insufficiently appropriate, and program implementers must make adjustments to support the program's targets or objectives better. The results indicated that the Family Hope Program's implementation was quite successful and effective but not yet ideal. There are still impoverished individuals who satisfy the criteria yet have not gotten field aid. This is because of the parties' lack of socialization, and so the policy is not optimal. This research implies that program content and policy sustainability should be reassessed.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Family Hope Program

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak dialami kebanyakan Negara yang sedang berkembang atau bahkan terkadang juga ditemukan di Negara Maju. Dampak yang paling dirasakan dari krisis ekonomi adalah menurunnya pendapatan masyarakat dan naiknya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan banyak masyarakat terutama masyarakat miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH (Program Keluarga Harapan (PKH)). Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi

kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Program Keluarga Harapan (PKH) ada sejak tahun 2007 yaitu dengan memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan

diIndonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.

Sasaran penerima bantuan PKH adalah keluarga miskin (yaitu orang tua-ayah, ibu-dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasikan dalam bentuk satu dapur). Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 yang meliputi tujuh Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Raya, Ambawang, Batu Ampar, Rasau Jaya, Kubu, Terentang, Dan Sungai Kakap. Kabupaten Kubu Raya dijadikan salah satu daerah sasaran PKH mengingat kondisi kemiskinan di daerah ini masih cukup tinggi.

Peran pendamping pada pelaksanaan PKH menjadi aktor penting dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping PKH dikatakan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program dilapangan. Pendamping diperlukan karena Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) tidak memiliki kemampuan melakukan seluruh tugasnya diseluruh Kecamatan dalam waktu bersamaan. Tugas utama pendamping PKH adalah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni pertemuan awal, validasi KM, pemutahiran data, verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, mengawal penyaluran bantuan,

melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), melakukan penanganan pengaduan, membuat laporan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan.

Namun, seiring berjalannya waktu pelaksanaan PKH dilapangan tidak sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan. Terlihat dari fenomena permasalahan diatas disebabkan karena pelaksanaan kurang optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti salah satu masyarakat Keluarga Miskin yang berasal dari desa Desa Pal IX, saat peneliti melakukan wawancara dengan mereka terkait Program Keluarga Harapan (PKH) ternyata sampai sekarang mereka belum mendapatkan bantuan dikarenakan mereka tidak mengetahui apa itu PKH, apa kegunaannya dan bagaimana cara pembuatannya. Kurangnya sosialisasi dari pendamping terhadap masyarakat yaitu seperti melakukan kunjungan langsung kerumah masyarakat miskin, yang mengakibatkan

ketidaktahuan tentang pentingnya manfaat dan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Identifikasi Masalah

- a. Masih ada masyarakat miskin yang memenuhi syarat atau kriteria tapi belum mendapatkan bantuan, sehingga baru 6,2% masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pal IX.
- b. Tidak sebandingnya petugas dan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pal IX.
- c. Dan masih kurangnya sosialisasi terhadap penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pal IX.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap.

4. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini yaitu “Bagaimana Efektivitas Implementasi Program Keluarga

Harapan (PKH) di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap ?”

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Efektivitas

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap.

6. Manfaat Penelitian

6.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan suatu permasalahan melalui suatu penelitian ilmiah.

6.2 Manfaat Praktis

1. Untuk digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan sehingga penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan dalam penanganan Program Keluarga Harapan (PKH).

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan

tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Proses pembuatan sebuah kebijakan melibatkan berbagai aktifitas yang kompleks.

Setiap tahap berhubungan dengan tahapan berikutnya, dan tahap terakhir dikaitkan dengan tahapan pertama, atau tahap ditengah, dalam lingkaran aktifitas yang tidak linear. Pada setiap tahap siklus kebijakan perlu pendekatan yang sesuai. Tahap formulasi, pendekatan yang banyak digunakan adalah normative, valuatif, prediktif ataupun empiric. Tahap implementasi banyak menggunakan pendekatan yang sama dengan tahap formulasi.

Pemilihan pendekatan sangat menentukan tingkat efektifitas dan keberhasilan suatu kebijakan. kebijakan.

Menurut R Dye (dalam Subarsono, 2005:2) menyebutkan kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi kebijakan publik dari Thomas R Dye tersebut mengandung makna bahwa:

a) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta

b) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut Eyestone dalam (Winarno, 2007:17), ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Anderson (dalam Winarno 2007:13) bahwa : kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna.

Dari dua pengertian atau definisi mengenai kebijakan publik yang dikemukakan oleh dua ahli tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan publik dapat dibuat karena adanya masalah publik dan perlakuan apa yang diberikan atas masalah politik tersebut, apakah akan dilaksanakan atau diambil suatu tindakan dengan pertimbangan-

pertimbangan dan pemikiran tertentu ataukah sebaliknya.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik

penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Nugroho, 2004: 158-160).

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2008:139), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Nugroho (2009 : 494) mengatakan bahwa implementasi kebijakana pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat

mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Terkait dengan keefektivan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada satu hal yang paling penting yaitu implementasi kebijakan harus menampilkan keefektivan dari kebijakan itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Nugroho (2003 : 179-182) bahwa ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam keefektivan implementasi kebijakan, yaitu :

1. "Tepat" Pertama adalah "tepat kebijakan". Ketepatan kebijakan ini dimulai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak di pecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh

lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. “Tepat” yang kedua adalah “tepat pelaksana”. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang di swastakan (*privatization* atau *contracting out*).

3. “Tepat” ketiga adalah “tepat target” ketetapan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lain. Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. “Tepat” keempat adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, dimana menjadi tempat bereaksinya lembaga perumus kebijakan dan pelaksanaan

kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah eksternal kebijakan, dimana public opinion mempresepsikan kebijakan dan implementasi kebijakan, serta *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keempat tepat tersebut masih perlu didukung agar menjadi lebih efektif, yaitu dukungan politik, dukungan strategi, dan dukungan teknis. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus adanya politik dari lingkungan administrasi publik itu sendiri, artinya adanya kerjasama atau koordinasi dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Dengan dukungan strategi yang dibuat sedemikian rupa, maka dukungan teknis mulai dari kompetensi administrasi sampai kesiapan kelembagaan dapat dilaksanakan sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan lebih efektif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori oleh Nugroho (2003, 179-182) sebagai acuan dalam

mengkaji tentang Eektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pal IX Kecamatan Sungai kakap.

3. Alur Pikir Penelitian

Berangkat dari teori Implementasi Kebijakan, maka dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, dapat digunakan beberapa aspek yang berkenaan dengan variabel atau faktor-faktor yang menentukan agar tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.

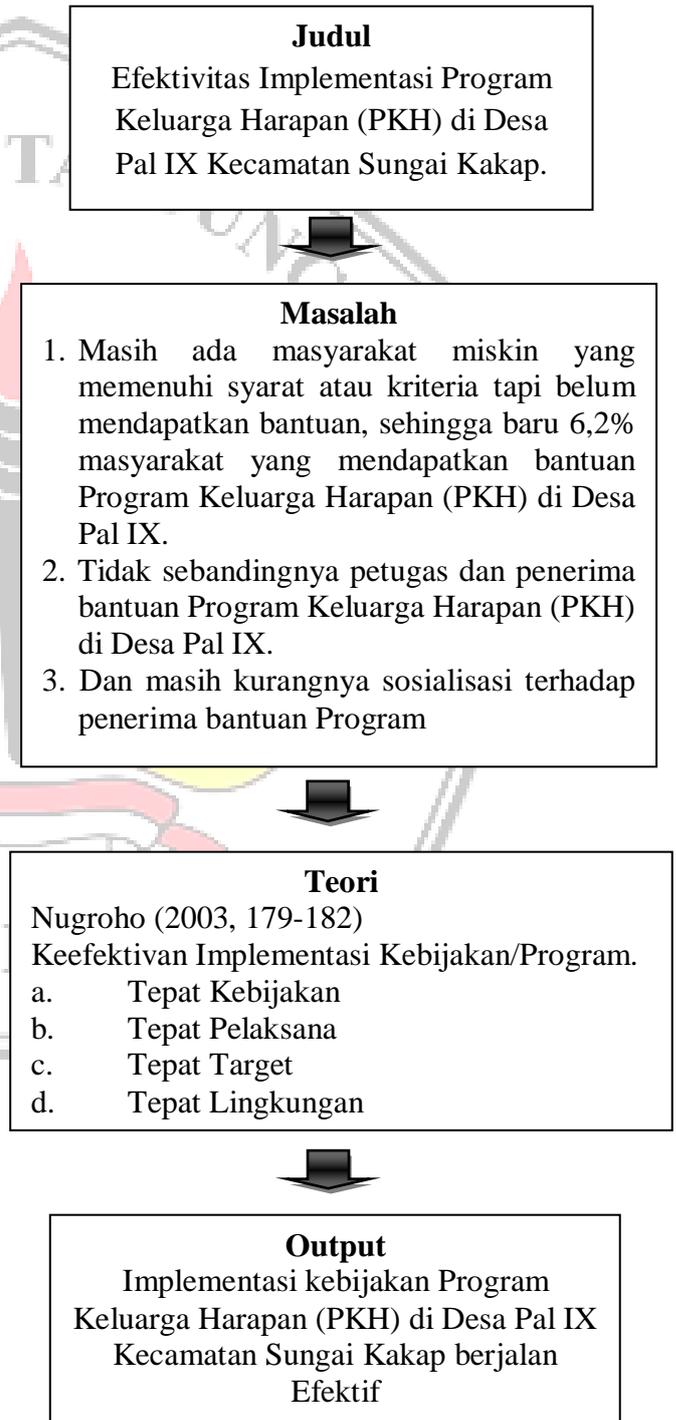
Menurut Nugroho (2003, 179-182) keberhasilan dan keefektivan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

1. Tepat Kebijakan
2. Tepat Pelaksana
3. Tepat Target
4. Tepat Lingkungan

Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dalam mempengaruhi tingkat keberhasilannya dan keefektivan implementasi suatu kebijakan atau program. Keempat

variabel tersebut perlu dilakukan dan disediakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi.

Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Silalahi (2012:27) penelitian deskriptif menyajikan suatu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2009:6) metode penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Penelitian kualitatif menurut Satori dan Komarian (2011:22) adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang penting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Jangan sampai suatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Peneliian

kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.

Bungin (2007:66) mengatakan, penelitian kualitatif diarahkan oleh produk berpikir induktif untuk menemukan jawaban logis terhadap apa yang sedang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, dan akhirnya produk berfikir induktif menjadi jawaban sementara terhadap apa yang dipertanyakan dalam penelitian dan menjadi perhatian itu, jawaban tersebut dinamakan dengan berfikir induktif-analisis.

Lokasi penelitian adalah di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap dengan Obyek yang diamati antara lain aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH, kondisi tempat tinggal penerima bantuan PKH, serta data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH di desa Pal IX.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap

2. Unit Pendamping PKH di Kecamatan Sungai Kakap 2 orang
3. Camat Pemerintahan Kecamatan Sungai Kakap
4. Masyarakat penerima bantuan PKH 2 orang

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimpletasikan kebijakan publik, maka ada plihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Untuk mengetahui dan menganalisis Evektifitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pal IX Kecamatan Sungai kakap berjalan dengan efektif, sesuai dengan tujuan penelitian sebagai mana telah di jelaskan sebelumnya maka peneliti menggunakan teori Riant Nugroho dalam menampilkan keefektifan implementasi program

yang meliputi 4 (empat) unsur tepat yakn:

1. Tepat Kebijakan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu solusi guna menuntaskan kemiskinan, menjamin keberlangsungan hidup serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang ada di Indonesia secara Khusus di Kecamatan Sungai Kakap.

Di lihat dari segi tepat kebijakannya bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan oleh Kementrian Sosial pada tahun 2014 di Kabupaten Kubu Raya dengan sangat rinci dan teratur yang tetuang dalam buku pedoman penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017.

2. Tepat Pelaksana

Penulis menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini belum tepat pelaksanaannya yaitu pemerintah sebagai aktor utama pelaksana yang mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH)guna memberdayakan masyarakat dalam pencapaian tujuan dari program tersebut.

Selanjutnya kita akan melihat dari segi kuantitas yang ada dalam personalia pelaksana program keluarga harapan di Desa Pal IX. Secara kuantitas memang personalia pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) atau UPPKH di Kecamatan Sungai Kakap hanya berjumlah 2 orang yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin yang berjumlah 8.902 KK.

3. Tepat Target

Program ini adalah program baru dari pemerintah dan tidak memperbaharui program sebelumnya. Menjadi catatan penting jika sebuah program atau kebijakan tersebut baru maka akan berdampak pada kesiapan dan tepat tidaknya lingkungan dimana program tersebut dilaksanakan.

4. Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan berarti ada kesesuaian antara ruang lingkup kebijakan dengan kebijakan itu sendiri. Lingkungan kebijakan dapat berupa manusia dalam berbagai statusnya, para administrator, para pemerintah dalam berbagai eselon, para publik dalam berbagai peran sebagai kelompok sasaran.

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu pertama lingkungan kebijakan, dimana menjadi tempat bereaksinya lembaga perumus kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah eksternal kebijakan, serta yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan dari program tidak sepenuhnya tepat namun perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dari para implementor program maupun target atau sasaran dari program yang perlu adanya dukungan. Kemudian ketersediannya sarana dan prasarana yang memadai untuk memberi kontribusi yang cukup besar di lingkungan tempat pengerjaannya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang telah penulis kemukakan pada dasarnya kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sudah berhasil dan cukup efektif,

namun ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dari pembahasan tersebut, yaitu :

1. Tepat Kebijakan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan yang tepat. Program ini di pertunjukan untuk masyarakat yang kurang mampu seperti ibu hamil/nifas anak-anak putus sekolah dan penyandang disabilitas. Namun pada hasilnya masih terdapat adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan Program tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari koordinator PKH kepada masyarakat tentang pentingnya Program tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pentingnya program tersebut dan bagaimana cara pembuatan bantuan itu sendiri.

2. Tepat Pelaksana

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap melaksanakannya berdasarkan panduan yang ada pada buku pedoman penyelenggaraan bantuan. Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan (PKH) di desa Pal IX sudah tepat pelaksanaannya. Namun permasalahan yang di temukan adalah masih terdapat adanya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dikarenakan para koordinator PKH yang sangat sedikit yang hanya 2 orang dan harus mensosialisasikan ke 13 Desa yang terdapat mayarakat miskin.

3. Tepat Target

Sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masyarakat miskin yang mempunyai kriteria tertentu seperti ibu hamil/nifas, anak putus sekolah, penyandang disabilitas dan lanjut usia 70 tahun keatas. Target dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Pal IX belum sepenuhnya tepat, karena masih masyarakat miskin yang mempunyai kriteria seperti yang di sebutkan diatas namun belum mendapatkan bantuan tersebut.

4. Tepat Lingkungan

Lingkungan adalah dimana sebuah kebijakan di terapkan mengambil alih yang cukup besar bagi keberlangsungan pelaksanaan kebijakan. Program Keluarga Harapan (PKH) di terapkan pada

lingkungan yang tepat yaitu pada dusun atau desa. Lingkungan di desa Pal IX kecamatan sungai kakap belum sepenuhnya tepat dikarenakan dalam proses adaptasi dengan lingkungan dimana kebijakan di terapkan masih ditemui kekurangan, seperti minimnya atau ketidaktersedianya ruangan serta fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang proses pengerjaan/pendataan dalam kondisi belum cukup memadai.

2. Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan upaya perbaikan atau penyempurnaan atas kekurangan kelemahan yang terjadi maka peneliti bermaksud memberikan saran sebagai berikut :

1) Tepat Kebijakan

Untuk keberlangsungan program ini perlu adanya perhatian tentang kebijakan/program dan keberlangsungan program. Diharapkan para koordinator PKH lebih rutin memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat yang tidak mengetahui program tersebut dapat memdaftarkan Rumah Tangga(RT) nya.

2) Tepat Pelaksana

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya membutuhkan staf/koordinator yang seimbang dengan jumlah masyarakat yang ada, karena dengan jumlah yang sedikit akan mempengaruhi kinerja staf yang ada dalam mengelola dan melayani masyarakat miskin.

3) Tepat Target

Perlu perhatian yang cukup bagi target/sasaran program yang mengalami kendala/permasalahan dalam proses pelaksanaan yang di akibatkan dari diri sendiri maupun dari luar. Bagaimana pun juga implementor bertanggung jawab dan ambil alih atas kendala-kendala/permasalahan yang dihadapi oleh target/sasaran. Karena keberhasilan program adalah tanggung jawab baik implementor maupun ttarget group/kelompok sasaran.

4) Tepat Lingkungan

Dalam hal mensosialisasikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di perlukan sarana dan prasarana dari pemerintah yang

memadai seperti ketersediaan ruangan untuk koordinator PKH, peralatan untuk pendataan, dan yang lain sebagainya dalam menunjang penerapan program guna keberlangsungan Program Keluarga Harapan (PKH).

F. REFERENSI

Buku-Buku :

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Public*. Bandung : Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Akutlisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Moleong Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Remaja Rosada Karya.
- Moh, Nazir. 1998. *Metode Penelitiam*. Jakarta: Ghalia Indomesia
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. ALFABETA
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Alfabeta
- Subarsono, Agg. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : konsep, teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tachjan, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI
- Winarno, Budi. 2003. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Med Pres
- 2012. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo

Dokumen :

- Kelurahan Pal IX. 2017. Profil kelurahan Pal IX. Pontianak

Pedoman Umum Pelaksanaan PKH
Tahun 2017

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Keluarga
Harapan

Usman, Claudio. 2014. *Efektivitas
Program Keluarga Harapan
(PKH) dalam Rangka
Penanggulangan Kemiskinan di
Kecamatan Kota Utara Kota
Gorontalo*. Skripsi diambil pada
tanggal 13 maret 2017 dari
[4503-8658-1-SM.pdf](#).

